



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Maret 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : H. SASMIRUDDIN
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 6981

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp.

755.800.000

1. Tanah Seluas 416 m2 di KOTA DUMAI , HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. Tanah Seluas 11900 m2 di KOTA DUMAI , HASIL SENDIRI Rp. 84.000.000
3. Tanah Seluas 7605 m2 di KOTA DUMAI , HASIL SENDIRI Rp. 72.000.000
4. Tanah Seluas 416 m2 di KOTA DUMAI , HASIL SENDIRI Rp. 6.600.000
5. Tanah Seluas 616 m2 di KOTA DUMAI , HASIL SENDIRI Rp. 7.200.000
6. Tanah Seluas 20000 m2 di KOTA DUMAI , HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
7. Tanah Seluas 10000 m2 di KOTA DUMAI , HASIL SENDIRI Rp. 36.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 1189 m2/255 m2 di KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 480.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

82.000.000

1. MOTOR, HONDA GRAND SEPEDA MOTOR Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
2. MOBIL, SUZUKI SWIFT SEDAN Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000



3. MOTOR, HONDA SUPRA X SPD MOTOR Tahun 2015, HASIL
SENDIRI Rp. 6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	250.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	7.672.174
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	845.722.174
III. HUTANG	Rp.	168.743.536
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	676.978.638

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **26 Juni 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.